PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

RENCANA KERJA
PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan acuan Rencana Strategis 2019-2024 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap dengan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tanjung, 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 6

1.4 Maksud dan Tujuan 6

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 17

BAB IV PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong 8
Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II 11
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 13
Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencanan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sedangkan Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUPA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan ke-3 Pemerintah Kabupaten Tabalong yakni "Mewujudkan Kemandirian Daerah. Dukungan untuk menyukseskan misi ke-3 dilaksanakan yaitu optimalisasi pendaatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Pada pertengahan tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD 2024 dan Renstra 2020-2024. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUPA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 52).

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan, target kinerja dan pagu kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB (80)**	-	**14,420,346,950**	**4,485,594,630**	**31.11**
1	**5.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah**	**34 Dokumen**	**20 Dokumen**	**43,040,000**	**13,278,200**	**30.85**
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34 Dokumen	20 Dokumen	43,040,000	13,278,200	30.85
2	**5.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah**	**44 Dokumen**	**6 Bln**	**9,820,323,000**	**3,459,047,367**	**35.22**
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	60 Orang	9,820,323,000	3,459,047,367	35.22
3	**5.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian**	**1**	**35%**	**50,000,000**	**35,260,000**	**70.52**
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	14 Orang	50,000,000	35,260,000	70.52
4	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**1**	**50%**	**1,274,640,919**	**377,557,417**	**29.62**
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	18,966,417	0	-

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	379,175,354	18,059,259	4.76
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	113,560,148	9,258,631	8.15
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	69 Laporan	762,939,000	350,239,527	45.91
5	**5.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**Unit**	-	**391,780,677**	**0**	-
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	79,994,430	**0**	-
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	-	311,786,247	**0**	-
6	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**1,440,196,287**	**513,716,833**	35.67
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4 Laporan	2 Laporan	6,000,000	1,750,000	29.17
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	183,000,000	71,464,680	39.05
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	53,637,087	1,830,000	3.41
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	1,197,559,200	438,672,153	36.63
7	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**6 Bulan**	**1,400,366,067**	**86,734,813**	**6.19**
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	8 Unit	469,990,000	86,734,813	18.45
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	930,376,067	0	-
II.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**43,54 %**	**80.48%**	**2,894,485,708**	**531,711,062**	**18.37**
			Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	**5,1 %**	**5.62%**			

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	**0.14**	**60.00%**			
1	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Pajak Daerah**	**99.332.283.832**	**39.979.985.113**	**2,894,485,708**	**531,711,062**	**18.37**
			Jumlah Retribusi Daerah	**11.638.406.296**	**3.118.684.362**			
			Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	**4 OPD**	**7 OPD**			
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	10,200,000	3,550,000	34.80
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	9 Dokumen	339,338,756	17,657,300	5.20
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	496,220,282	52,122,409	10.50
	5.02.04.2.01.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	60,420,000	12,117,050	20.05
	5.02.04.2.01.0005	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Dokumen	10 Dokumen	179,549,000	18,774,263	10.46
	5.02.04.2.01.0006	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1750 OP	880 OP	185,224,000	75,557,580	40.79
	5.02.04.2.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	132 Dokumen	66 Dokumen	223,378,542	31,708,823	14.20
	5.02.04.2.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9520 Layanan	3740 Layanan	110,893,885	49,571,252	44.70
	5.02.04.2.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12500 Dokumen	6367 Dokumen	196,938,200	85,835,807	3.59
	5.02.04.2.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	624,040,000	67,674,639	10.84
	5.02.04.2.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	3 Laporan	280,279,611	36,284,626	12.95
	5.02.04.2.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	96,385,232	34,446,928	35.74

NO	KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA		REALISASI		%
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.02.04.2.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	2 Laporan	91,618,200	46,410,385	50.66
		Total				**17,314,832,658**	**5,017,305,692**	**28.98**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Adapun capaian pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Pendapatan Daerah hingga Triwulan II
Tahun Anggaran 2024

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi	
	Triwulan I	Triwulan II
PENDAPATAN DAERAH	**546.425.549.771,48**	**1.176.193.316.350,40**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**60.907.109.928,48**	**118.326.985.852,43**
Pajak Daerah	21.695.547.759,00	41.792.961.105,00
Retribusi Daerah	1.446.488.733,00	3.267.201.412,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.226.686.396,00	14.735.829.206,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.538.387.040,48	58.530.994.129,43
PENDAPATAN TRANSFER	**485.518.439.843,00**	**1.057.866.330.498,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	417.558.722.388,00	933.807.506.941,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.959.717.455,00	124.058.823.557,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-
Pendapatan Hibah	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja seluruh program Badan Pendapatan Daerah sebagian sudah mencapai target yang sesuai dengan rencana aksi. Hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (Triwulan II)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Nilai)	5.00	-	5.00	-	5	14,420,346,950		3,022,247,806		1,463,346,824		-		-	-	4,485,594,630	0.00%	31.11%	5.00	4,485,594,630		0.00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah (10 Dokumen)		-	0.00	-	23	43,040,000	13	9,238,200	7	4,040,000		-		-	20	13,278,200	86.96%	30.85%	20.00	13,278,200	0.00%	0.00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun(") ( )		-	0.00	-	23	43,040,000	13	9,238,200	7	4,040,000					20	13,278,200	86.96%	30.85%	20.00	13,278,200	0.00%	0.00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan keuangan Perangkat Daerah (26 Dokumen)		-	0.00	-	12	9,820,323,000	3	2,396,610,307	3	1,062,437,060		-		-	6	3,459,047,367	50.00%	35.22%	6.00	3,459,047,367	0.00%	0.00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0.00	-	31	9,820,323,000	31	2,396,610,307	31	1,062,437,060					16	3,459,047,367	50.00%	35.22%	15.50	3,459,047,367	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)		-	0.00	-	100	50,000,000	25	7,700,000	25	27,560,000		-		-	50	35,260,000	50.00%	70.52%	50.00	35,260,000	0.00%	0.00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0.00	-	10	50,000,000	6	7,700,000	8	27,560,000					14	35,260,000	140.00%	70.52%	14.00	35,260,000	0.00%	0.00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		-	0.00	-	100	1,274,640,919	25	163,824,112	25	213,733,305		-		-	50	377,557,417	50.00%	29.62%	50.00	377,557,417	0.00%	0.00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	4	18,966,417	1	-	1	-					2	-	50.00%	0.00%	2.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	4	379,175,354	1	2,465,000	1	15,594,259					2	18,059,259	50.00%	4.76%	2.00	18,059,259	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	4	113,560,148	1	7,960,900	1	1,267,731					2	9,258,631	50.00%	8.15%	2.00	9,258,631	0.00%	0.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0.00	-	114	762,939,000	29	153,368,212	40	196,871,315					69	350,239,527	60.53%	45.91%	69.00	350,239,527	0.00%	0.00%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah (Persen)			0.00		100	391,780,677	25	-	25	-					50	-	50.00%	0.00%	50.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0.00		0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0.00		0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0.00		0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0.00		8	79,994,430	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0.00		0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0.00		0	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0.00		88	311,786,247	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)			0.00		12	1,440,196,287	3	390,156,674	3	123,560,159					6	513,716,833	50.00%	35.67%	6.00	513,716,833	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0.00		4	6,000,000	1	1,750,000	1	-					2	1,750,000	50.00%	29.17%	2.00	1,750,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			0.00		12	183,000,000	3	50,956,415	3	21,408,265					6	71,464,680	50.00%	39.05%	6.00	71,464,680	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0.00		4	53,637,067	1	1,830,000	1	-					2	1,830,000	50.00%	3.41%	2.00	1,830,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0.00		12	1,197,559,200	3	336,520,259	3	102,151,894					6	438,672,153	50.00%	36.63%	6.00	438,672,153	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)			0.00		100	1,400,366,067	25	54,718,513	25	32,016,300					50	86,734,813	50.00%	6.19%	50.00	86,734,813	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0.00		40	469,990,000	-	54,718,513	8	32,016,300					8	86,734,813	20.00%	18.45%	8.00	86,734,813	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0.00		1	930,376,067	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45.42%	31.11%				
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

		KEUANGAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%) (%)	14.00		61.53		14												0.00%		14.00			
			Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	5.10		2.68		5.1	2,894,485,708		235,696,328		296,014,734					531,711,062	0.00%	18.37%	5.10	531,711,062		0.00%
			Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	43.54		40.02		43.54											0.00%		43.54			
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4. Jumlah Pajak Daerah 5. Jumlah Retribusi Daerah 6. Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target (12.187.192. 358 Rupiah 4 OPD)			0.00		0		-		-						-	0.00%		0.00		0.00%	
			Jumlah Pajak Daerah (Rupiah)			0.00		104,016,101,486		21,607,070,645		39,979,985,113				39,979,985,113	38.44%		39979985113.00		0.00%	
			Jumlah Retribusi Daerah (Rupiah)			0.00		12,187,192,358		1,340,711,633		3,118,684,362				3,118,684,362	25.59%		3118684362.00		0.00%	
			Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target (OPD)			0.00		4		7		7				14	350.00%		14.00		0.00%	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		4	10,200,000	1	-	2	3,550,000					3	3,550,000	75.00%	34.80%	3.00	3,550,000	0.00%	0.00%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		3	339,338,756	6	4,898,200	3	12,759,100					9	17,657,300	300.00%	5.20%	9.00	17,657,300	0.00%	0.00%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)			0.00		4	496,220,282	1	30,262,991	1	21,859,418					2	52,122,409	50.00%	10.50%	2.00	52,122,409	0.00%	0.00%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)			0.00		4	60,420,000	1	2,738,200	1	9,378,850					2	12,117,050	50.00%	20.05%	2.00	12,117,050	0.00%	0.00%
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)			0.00		24	179,549,000	5	9,951,300	5	8,822,963					10	18,774,263	41.67%	10.46%	10.00	18,774,263	0.00%	0.00%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)			0.00		1750	185,224,000	392	31,013,568	488	44,544,012					880	75,557,580	50.29%	40.79%	880.00	75,557,580	0.00%	0.00%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		132	223,378,542	33	31,708,823	33	-					66	31,708,823	50.00%	14.20%	66.00	31,708,823	0.00%	0.00%
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)			0.00		9520	110,893,885	1,392	15,565,200	2,348	34,006,052					3,740	49,571,252	39.29%	44.70%	3740.00	49,571,252	0.00%	0.00%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)			0.00		12500	196,938,200	2,401	37,094,649	3,966	48,741,158					6,367	85,835,807	50.94%	43.59%	6367.00	85,835,807	0.00%	0.00%
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)			0.00		4	624,940,000	1	36,667,539	1	30,807,100					2	67,674,639	50.00%	10.84%	2.00	67,674,639	0.00%	0.00%

		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		-	0.00	-	4	-	-	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)		-	0.00	-	4	280,279,611	2	6,851,426	1	29,433,200					3	36,284,626	75.00%	12.95%	3.00	36,284,626	0.00%	0.00%
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		-	0.00	-	4	96,385,232	3	12,908,924	1	21,538,004					4	34,446,928	100.00%	35.74%	4.00	34,446,928	0.00%	0.00%
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		-	0.00	-	4	91,618,200	1	15,835,508	1	30,574,877					2	46,410,385	50.00%	50.66%	2.00	46,410,385	0.00%	0.00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%):									82.64%	18.37%				
										Predikat Kinerja									Tinggi	Sangat Rendah					
								17,314,832,658		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									51.64%	28.98%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Rendah	Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang bertambah dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Target Indikator Nilai AKIP adalah 80 (BB)

    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan target 23 dokumen berubah menjadi 34 dokumen.

        1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pada saat APBDP 2024 ini mengalami perubahan dari pagu kegiatannya Rp. 43.040.000,- menjadi Rp. 123.309.000,- dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah awalnya sebanyak 23 dokumen menjadi 34 dokumen. Penambahan tersebut untuk penambahan honor PPTK dan belanja perjalanan dinas terkait perencanaan

    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terpenuhinya Administrasi Keuangan selama 12 bulan.

        2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pada sub kegiatan ini pada APBDP 2023 mengalami pergeseran dan penambahan belanja sebesar Rp 792.904.000,- dari pagu awal Rp. 9.820.323.000,- menjadi 10.613.227.000,-. Penambahan pagu untuk kekurangan tunjangan fungsional PPPK, tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS, iuran jaminan kesehatan PPPK, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkankondisi kerja PNS dan pergeseran belanja insentif non ASN dan insentif KDH/WKDH untuk menambah belanja insentif ASN. Target indikator pada sub kegiatan ini juga berubah, untuk jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang sebelumnya 31 Orang/ Bulan menjadi 30 Orang/ Bulan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 100%

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Selengkapnya. Sub kegiatan ini baru muncul pada APBDP 2024 ini dengan pagu Rp. 62.173.320,- guna pembelian pakaian batik/sasirangan hari jadi Tabalong. Target indikator ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 1 paket.

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pada perubahan ini mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 100.000.000,- dari pagu awal Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 150.000.000,-. Penambahan pagu ini terdiri dari penambahan jumlah peserta pelatihan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang. Target kinerja juga mengalami perubahan, untuk jumlah pegawai berdasar tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target Indikator Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum 100%

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 673.992,- dari Rp. 18.966.417,- menjdai Rp. 18.292.425,-. Untuk indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat penambahan pagu belanja sebesar Rp. 2.918.054,- dari Rp. 379.175.354,- menjadi Rp. 382.093.408,-. Penambahannya berupa Penambahan Anggaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Pada sub kegiatan ini terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 13.321.590, dari pagu awal Rp. 113.560.148,- menjadi Rp. 100.238.558,-. Target indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tidak mengalami perubahan, tetap 4 paket.

4.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada sub kegiatan ini terdapat penambahan pagu anggaran

sebesar Rp. 689.314.000, dari pagu induk Rp. 762.939.000,- menjadi Rp. 1.452.253.000. Penambahan anggaran ini terdiri dari penambahan belanja perjalanan dinas untuk kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Target indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mengalami perubahan dari 114 laporan menjadi 184 laporan.

4.4 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang baru pada APBDP 2024 dengan pagu anggaran Rp. 286.611.135,- yang berisi belanja boks arsip, jasa penataan arsip dan rak arsip. Target indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD adalah 3 paket.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Barang Milik Daerah dari 96 unit menjadi 68 unit.

5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 400.955.531,- dari pagu awal Rp. 79.994.430,- menjadi Rp. 480.949.961,-, yang berisi penambahan belanja pompa air, mesin penghancur kertas, running text jam musholla, vacum cleaner,dispenser bawah, sound system ruangan, laptop teknis, printer, audio mixer, TV 65 Inchi, TV 98 Inch. Target indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan mengalami penambahan dari 8 unit menjadi 28 unit.

5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 144.304.888,- dari Rp. 311.786.247,- menjadi Rp. 456.091.135,- untuk Penambahan belanja gorden, karpet, papan reklame (neon box), meja baca HPL, sedangkan meja kerja anggarannya dihapus. Target indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mengalami penambahan dari 30 unit menjadi 40 unit.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 12 bulan

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Pagu anggarannya tetap Rp.

6.000.000 dengan target indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 4 laporan.

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan, pagu anggarannya tetap sebesar Rp. 183.000.000,-. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.

6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 27.703.102,- dari pagu awal Rp. 53.637.087,- menjadi Rp. 81.340.189,-, guna pembelian tinta printer, aksesoris komputer dan hardisk eksterna . Terget indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 4 laporan.

6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 1.197.559.200,- menjadi Rp. 1.202.959.200,- dikarenakan adanya penambahan belanja makan dan minum rapat. Target indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan tidak mengalami perubahan, yaitu 12 laporan.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Indikator Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tidak ada penambahan penambahan pagu anggaran, tetap sebesar Rp. 469.990.000,-. Target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 40 unit.

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 42.075.254,- dari pagu awal Rp. 930.376.067,- menjadi Rp. 972.451.321,- untuk belanja perencanaan, pengawasan dan rehab atap. Target indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi tidak mengalami perubahan, yaitu 1 unit.

2. Program Pengelola Pendapatan Daerah dengan Perubahan Target Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 35,18%, Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 46,10%, Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target 54%.

   1) Kegiatan Pengelola Pendapatan Daerah dengan Perubahan Target Indikator Jumlah Pajak Daerah Rp. 85.313.474.000,-, Jumlah Retribusi Daerah Rp. 111.795.793.776,-, Jumlah OPD Pengelola Retribusi yang Mencapai Target 7 dari 13 PD.

      1.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, tidak terdapat penambahan pagu anggaran, tetap Rp. 10.200.000,-. Target indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah juga tidak mengalami perubahan, tetap 4 Dokumen.

      1.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 236.079.963,- dari pagu sebelumnya Rp. 339.338.756,- menjadi Rp. 575.418.719,- penambahan guna pembayaran penambahan honorarium PPTK, pembelian seragam sasirangan, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi, perjalanan dinas dalam kota, belanja modal laptop teknis, tablet, printer Target indikator jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah mengalami perubahan, dari 3 dokumen menjadi 11 dokumen.

      1.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 358.606.824,-, dari pagu awal Rp. 496.220.282,- menjadi Rp. 854.827.106,-. Penambahan anggaran untuk penambahan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosialisasi pajak daerah, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, sewa gedung, belanja perjalanan dinas biasa luar provinsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Target indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah tidak mengalami perubahan, yaitu 4 laporan.

      1.4 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 155.770.380,- dari pagu awal sebesar Rp. 60.420.000,- menjadi Rp. 216.190.380,- untuk Penambahan belanja fotocopy, honorarium narasumber atau

pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

1.5 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 244.149.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 179.549.000,- menjadi Rp. 423.698.000,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa komputer jaringan (langganan dedicated server pajak daerah, 2 IP), SSL server SIMPBB SIMBPHTB, Perbaikan Pembayaran SIMPBB SIMPBB dan Pemasangan Antivirus, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop teknis dan belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software). Untuk target indikator jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah mengalami perubahan, dari 24 laporan menjadi 22 laporan.

1.6 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 619.039.561,- dari sebelumnya Rp. 185.224.000,- menjadi Rp. 804.263.561,- untuk penambahan Penambahan untuk belanja ATK, belanja cetak, belanja bahan komputer, belanja suvenir/ cindera mata, belanja pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja jasa iklan/ reklame, film dan pemotretan, belanja pemeliharaan camera untuk kegiatan penilaian PBB P2 serta BPHTB, penambahan belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal telpon seluler, personal computer dekstop all in one, PC Admin geospasial, monitor display, printer portable,tablet, printer dot matrik, printer multi fungsi besar, NAS Storage, proyektor, UPS dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis. Target indikator jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya mengalami perubahan,dari 1750 OP menjadi 2750 OP .

1.7 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 359.933.724,- dari pagu awal sebesar Rp. 223.378.542,- menjadi Rp. 583.312.266,- untuk Penambahan untuk belanja kertas dan cover, belanja bahan komputer, perlengkapan dinas, souvenir, pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas, belanja modal perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaaan

aplikasi pajak daerah. Target indikator jumlah dokumen ketetapan pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap 132 dokumen.

1.8 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 350.893.885,- dari pagu awal Rp. 110.893.885,- menjadi Rp. 461.787.770,- untuk Penambahan untuk belanja kertas dan cover, belanja bahan komputer, perlengkapan dinas, souvenir, pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas, belanja modal perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaaan aplikasi pajak daerah. Target indikator jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah mengalami perubahan, dari 9.520 layanan menjadi 12.520 layanan.

1.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 44.010.000,- dari pagu sebelumnya Rp. 196.938.200,- menjadi Rp. 240.948.200,- untuk Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan. Target indikator jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi ada perubahan, dari 4 dokumen menjadi 13.750 dokumen.

1.10 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 176.551.179,- dari pagu awal sebesar Rp. 624.040.000,- menjadi Rp. 800.591.179,- dikarenakan adanya Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan. Target indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 4 dokumen

1.11 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 248.540.040,- dari pagu awal Rp. 280.279.611,- menjadi Rp. 528.819.651 untuk Penambahan untuk honor PPTK, belanja souvenir/ cinderamata, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop non teknis, personal komputer, tablet, printer, belanja modal upgrade dan pengembangan aplikasi ependa. Target indikator jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah mengalami perubahan, dari 4 dokumen menjadi 5 dokumen.

1.12 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 116.677.000,-, dari pagu awal Rp. 96.385.232,- menjadi

Rp. 213.062.232,- dikarenakan adanya Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa. Target indikator jumlah laoran hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

1.13 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 21.360.000,- dari pagu awal Rp. 91.618.200,- menjadi Rp. 112.9778.200,- untuk Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa. Target indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan, tetap 4 laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.420.346.950	2.620.682.702	17.041.029.652	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	23 dok	34 dok	43.040.000	80.269.000	123.309.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 dok	34 dok	43.040.000	80.269.000	123.309.000	Penambahan Honor PPTK dan Belanja Perjalanan Dinas terkait perencanaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 dok	44 dok	9.820.323.000	792.904.000	10.613.227.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/ Bln	30 Org/ Bln	9.820.323.000	792.904.000	10.613.227.000	Penambahan pagu untuk kekurangan tunjangan fungsional PPPK, tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS, iuran jaminan kesehatan PPPK, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkankondisi kerja PNS dan pergeseran belanja insentif non ASN dan insentif KDH/WKDH untuk menambah belanja insentif ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	100%	50.000.000	162.173.320	212.173.320	

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-	62.173.320	62.173.320	Pengadaan Pakaian Batik/Sasirangan Hari Jadi Tabalong
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	30 Org	50.000.000	100.000.000	150.000.000	Penambahan jumlah peserta pelatihan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 10 orang menjadi 30 orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**1.274.640.919**	**964.897.607**	**2.239.538.526**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.966.417	(673.992)	18.292.425	Pergeseran Anggaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	379.175.354	2.918.054	382.093.408	Penambahan Anggaran Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	113.560.148	(13.321.590)	100.238.558	Pengurangan dan Pergeseran Anggaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	184 Laporan	762.939.000	689.314.000	1.452.253.000	Penambahan belanja perjalanan dinas
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3 Paket	-	286.661.135	286.661.135	Penambahan Anggaran untuk belanja boks arsip, jasa penataan arsip dan rak arsip

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah**	**96**	**96**	**391.780.677**	**545.260.419**	**937.041.096**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	79.994.430	400.955.531	480.949.961	Penambahan belanja pompa air, mesin penghancur kertas, running text jam musholla, vacum cleaner, dispenser bawah, sound system ruangan, laptop teknis, printer, audio mixer, TV 65 Inchi, TV 98 Inch
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	40 Unit	311.786.247	144.304.888	456.091.135	Penambahan belanja gorden, karpet, papan reklame (neon box), meja baca HPL, sedangkan meja kerja anggarannya dihapus
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.440.196.287**	**33.103.102**	**1.473.299.389**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	-	6.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	183.000.000	-	183.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	53.637.087	27.703.102	81.340.189	Pembelian tinta printer, aksesoris komputer dan hardisk eksternal

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.197.559.200	5.400.000	1.202.959.200	Penambahan Untuk Belanja Makan dan Minum Rapat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**1.400.366.067**	**42.075.254**	**1.442.441.321**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit		469.990.000	-	469.990.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	930.376.067	42.075.254	972.451.321	Penambahan belanja perencanaan, pengawasan dan rehap atap
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Konstibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**43,54%**		**2.894.485.708**	**2.931.611.556**	**5.826.097.264**	
				Persentase Konstibusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	**5,1%**					
				Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	**14%**					
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Pajak Daerah**	**104,016,101,486**		**2.894.485.708**	**2.931.611.556**	**5.826.097.264**	
				Jumlah Retribusi Daerah	**12,187,192,358**					
				Jumlah OPD pengelola retribusi yang mencapai target	**4 OPD**					
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dok	4 Dok	10.200.000	-	10.200.000	

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	11 Dokumen	339.338.756	236.079.963	575.418.719	Penambahan untuk honorarium PPTK, pembelian seragam sasirangan, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi, perjalanan dinas dalam kota, belanja modal laptop teknis, tablet, printer.
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	496.220.282	358.606.824	854.827.106	Penambahan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosialisasi pajak daerah, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, sewa gedung, belanja perjalanan dinas biasa luar provinsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	60.420.000	155.770.380	216.190.380	Penambahan belanja fotocopy, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan perjalanan dinas biasa

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	22 Laporan	179.549.000	244.149.000	423.698.000	Penambahan untuk belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa komputer jaringan (langganan dedicated server pajak daerah, 2 IP), SSL server SIMPBB SIMBPHTB, Perbaikan Pembayaran SIMPBB SIMPBB dan Pemasangan Antivirus, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop teknis dan belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software)

NO. / URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	RKPD SETELAH PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dok	4 Dok	624.040.000	176.551.179	800.591.179	Penambahan untuk honor PPTK, belanja makan dan minum rapat/ sosialisasi/ bimtek/ lokakarya/ workshop/ seminar/ pertemuan
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dok	5 Dok	280.279.611	248.540.040	528.819.651	Penambahan untuk honor PPTK, belanja souvenir/ cinderamata, belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal laptop non teknis, personal komputer, tablet, printer, belanja modal upgrade dan pengembangan aplikasi ependa
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	96.385.232	116.677.000	213.062.232	Penambahan untuk belanjaperlengkapan dinas (sepatu dan topi lapangan), pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dan perjalanan dinas biasa
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		91.618.200	21.360.000	112.978.200	Penambahan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota
							17.314.832.658	**5.552.294.258**	**22.867.126.916**	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Darah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
2. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan, arahan dalam melaksanakan program, kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun berjalan tahun 2024;
3. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun agar lebih terukur dan terarah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong Terdepan.

Tanjung, 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004